



SUMBER BERITA

SABTU, 10 NOVEMBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tidak Bayar Pajak, Mantan Kades Terancam Pidana

KOTA BINTUHAN - Pengajuan pencairan DD (dana desa) tahap III tahun 2018 ini sedang dalam proses. Namun tidak semua desa berjalan mulus, beberapa desa yang dijabat pjs kades banyak bermasalah. Salah satunya adalah belum dibayarnya pajak pekerjaan DD tahap I dan II lalu.

Ini karena sebagian mantan kades yang masa jabatannya berakhir pertengahan 2018, banyak yang tidak bertanggungjawab. Setelah tidak menjabat lagi mantan kades cuek terhadap laporan DD. Ada yang tidak mau bayar pajak penggunaan DD tahap pertama dan kedua yang sudah dilaksanakan. Ini menjadi persoalan, karena bisa menghambat pencairan

DD tahap ketiga.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Asmawi, S.Ag, MH menyatakan ada 10 desa yang bermasalah soal pajak yang belum dibayar mantan kades. Sementara pjs kades yang baru tidak tahu aliran dana tersebut, sehingga pajak belum dibayar sampai kini.

"Saya akui banyak mantan kades yang menghilang dan tidak tanggung jawab dengan kegiatan pelaksanaan DD tahap pertama dan kedua. Ada kades yang susah dihubungi oleh pjs kades. Sementara pajak kegiatan

DD yang telah dikerjakan dengan besaran Rp 27 juta belum dibayarkan," kata Asmawi.

Asmawi menambahkan bersama Inspektorat akan menjadikan pajak tersebut temuan. Jika dalam 60 hari masa kerja setelah dikeluarkan temuan dari instansi berwenang mantan kades tidak bayar pajak harus bertanggungjawab secara hukum. Bisa terkena pidana, lantaran tidak bayar pajak kegiatan yang sudah dilaksanakannya.

Asmawi pjs kades tetap mengajukan pencairan tahap ketiga. Karena akan ada pengecualian jika pajak tidak dibayar pejabat

sebelumnya. Karena proses pengajuan tahap ketiga ini waktunya singkat, sehingga tidak bisa menunggu mantan kades. Bisa-bisa terlambat pembangunan di desa. Karena waktu pencairan DD tahap ketiga sekitar sebulan lagi.

"Khusus desa yang dijabat pjs dan bermasalah soal pajak, saya pastikan tidak akan menghalangi pencairan. Jika ada persoalan akan jadi risiko mantan kades. Karena sudah berulang, kita ingatkan. Salah satunya di Desa Pahlawan Ratu yang masih nunggak," pungkask Asmawi. (cik)